

ANALISIS IMPLEMENTASI PENGELOLAAN SAMPAH MELALUI “SAHABAT SAMPAH” SEBAGAI INOVASI PENANGANAN SAMPAH DI KECAMATAN SAMBOJA

Syaiful Fadly¹, Adri Patton², Iman Surya³

¹Aparatur Sipil Negara Kelurahan Kampung Lama, Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara

²Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

³Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

Korespondensi: syaifulfadli13@gmail.com

Abstract

This research aims to empirically analyze the implementation of waste management “Sahabat Sampah” as a waste management innovation in Samboja district. This study uses a qualitative approach with the intention of obtaining a description of the implementation of waste management through in Samboja district. The data obtained were carried out by observation, documentation and interview techniques, which were then analyzed using descriptive analysis models with coding techniques. The result showed that the implementation of waste management policies in Samboja district through the role of Sahabat Sampah has been effective. Based on the 4 (four) indicator approach developed by Edward III (communication, resources, bureaucratic structure and disposition), it can be seen that the overall implementation of waste management policies has well done. Although in some aspect it still needs to be developed so that implementation can run more optimally. Among other things, the aspect of funding sources is still limited and education and outreach to the community as a whole.

Keywords: *Waste, Implementation of Waste Management, Sahabat Sampah*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris implementasi pengelolaan sampah “Sahabat Sampah” sebagai inovasi penanganan sampah di Kecamatan Samboja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan maksud untuk mendapatkan deskripsi dari implementasi pengelolaan sampah melalui peran “Sahabat Sampah” di Kecamatan Samboja. Data yang didapatkan dilakukan dengan teknik observasi, dokumentasi dan wawancara, yang kemudian di analisis menggunakan model analisis deskriptif dengan teknik pengkodean. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Samboja melalui peran Sahabat Sampah sudah berjalan efektif. Berdasarkan pendekatan 4 (empat) indikator yang dikembangkan oleh Edward III (komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi dan Disposisi), dapat dilihat bahwa secara menyeluruh implementasi kebijakan pengelolaan sampah sudah berjalan dengan baik. Meskipun pada beberapa aspek masih perlu dikembangkan agar implementasi dapat berjalan lebih optimal. Di antaranya aspek sumber pendanaan yang masih terbatas, kemudian edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat secara menyeluruh.

Kata Kunci: *Sampah, Implementasi Pengelolaan Sampah, Sahabat Sampah*

Pendahuluan

Pertumbuhan penduduk memiliki dampak yang serius pada potensi kerusakan lingkungan, yang di antaranya disebabkan oleh produksi limbah rumah tangga yang bertumbuh seiring dengan peningkatan jumlah penduduk Vinod (2001: 116). Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Purnaweni (2017:1), bahwa penambahan penduduk yang secara langsung berpengaruh terhadap beragamnya aktivitas manusia dan peningkatan jumlah konsumsi, membuat potensi sampah semakin bertumpuk. Pada faktanya, pertumbuhan

jumlah penduduk di wilayah perkotaan memiliki korelasi yang signifikan terhadap penambahan jumlah sampah (Damanhuri, 2010: 39). Di antara berbagai faktor yang menjadi penyebab menumpuknya sampah selain aktivitas penduduk adalah: kepadatan penduduk, sistem pengelolaan sampah, keadaan geografis, musim dan waktu, kebiasaan penduduk, teknologi serta sosial ekonomi (Elamin, 2018: 2).

Dalam sebuah data yang disampaikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2018, bahwa volume sampah di Indonesia berkisar 65 juta ton per tahun, yang komposisi utamanya adalah sampah organik 60 persen, dan sampah plastik sebanyak 14 persen yang jumlahnya terus mengalami peningkatan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018: 1). Pada sebuah penelitian ditemukan bahwa pada tahun 2010, Indonesia menempati posisi kedua di dunia dalam menyumbang populasi sampah di lautan, yaitu sebesar 3,2 juta ton (Jembeck, 2015). Hasil temuan ini menjadi sangat menarik untuk dibahas lebih jauh, karena negara industri terbesar seperti Amerika Serikat justru menempati posisi ke 20, dan India sebagai negara dengan populasi manusia terbanyak kedua di dunia menempati posisi diluar 10 besar. Pada lanjutan penelitiannya Jembeck (2015) menegaskan bahwa terdapat korelasi antara kemampuan suatu negara dalam melakukan pengelolaan plastik di darat dengan jumlah sampah di lautan. Dengan kata lain, semakin efektif pengelolaan sampah suatu negara di daratan, maka semakin sedikit potensi sampah terbuang ke lautan.

Damanhuri dan Padi (2010:9) menjelaskan situasi pengelolaan sampah di Indonesia yang diperkirakan hanya sekitar 60 persen sampah di kota besar yang dapat terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Provinsi Kalimantan Timur juga memiliki persoalan serius terkait sampah dan tata kelolanya. Dalam laporan Badan Pusat Statistik tahun 2016, meskipun produksi sampah di Kalimantan Timur dalam kurun waktu 2012-2015 cenderung mengalami penurunan, tetapi terjadi peningkatan sangat signifikan dari tahun 2014 ke 2015, yaitu bertumbuh sebesar 124 persen. Peningkatan jumlah sampah tentu menjadi salah satu faktor utama peningkatan potensi timbulan sampah yang gagal dikelola. Provinsi Kalimantan Timur memiliki catatan yang tidak terlalu baik dalam proses pengelolaan sampah di daerah. Terbukti berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2016, dalam kurun waktu 2012-2015, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur hanya mampu melakukan pengelolaan sampah hingga terangkut ke tempat pembuangan rata-rata 58,26 persen dari total populasi sampah yang ada. Berdasarkan data tersebut, artinya ada sekitar 41,74 persen potensi sampah yang tidak berhasil terangkut atau gagal dikelola (Badan Pusat Statistik, 2016: 56).

Jika dilihat lebih jauh, kontribusi sampah gagal di kelola tersebut disumbang oleh seluruh kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Salah satu penyumbang sampah gagal dikelola terbesar adalah Kabupaten Kutai Kartanegara. Berdasarkan laporan yang diambil dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional tahun 2018, dapat dilihat bahwa persentase dari jumlah sampah yang tidak dikelola di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sekitar 77,5 persen (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, 2018: 73).

Tabel 1 . Jumlah Sampah Ditimbun di TPA dan Jumlah Sampah Tidak Dikelola Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur (2018)

No	Nama Kota/Kab	Jumlah Penduduk	Luas Adm Wilayah (km ²)	Jumlah Sampah Ditimbun di TPA (ton/hari)	Jumlah Sampah Tidak Dikelola (ton/hari)	Persentase Sampah Tidak Dikelola (%)
1	Balikpapan	636	503,33	353,24	3,01	8,52 %
2	Kutai Timur	91	1262,59	120	0,00	0 %
3	Berau	69969	23,80	105,5	0,75	0,71 %

Tabel lanjutan:

4	Kutai Kartanegara	114,00	398,10	40,00	31,00	77,5 %
5	Samarinda	932534	718,00	521,48	276,59	53 %
6	Bontang	176515	497,57	71,27	5,50	7,72 %

Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, 2018

Melihat penurunan kemampuan dalam pengelolaan sampah yang terjadi di Provinsi Kalimantan Timur, maka dapat disimpulkan jika aktivitas pengelolaan sampah masih belum menjadi konsen dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur secara menyeluruh. Pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah sesuai amanah yang tertuang dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2008, meskipun tetap harus mendapat dukungan berupa kebijakan yang solutif dari pemerintah pusat (Quina, 2019: 2).

Menangani sampah jelas tidak hanya dapat diatasi oleh pemerintah dalam skala provinsi maupun daerah, keterlibatan seluruh *stakeholders*, terkhusus pemerintah desa dalam skala kecamatan seharusnya juga aktif dan fokus dalam upaya menangani persoalan sampah di wilayahnya masing-masing. Sampah adalah persoalan menyeluruh, dan cara penyelesaiannya juga harus dilakukan secara menyeluruh. Sumber sampah justru terletak di kantong-kantong rumah tangga, yang sangat jauh dari jangkauan pemerintah provinsi maupun daerah. Karena itu pemerintah desa seharusnya ikut terlibat secara aktif dalam upaya untuk menangani persoalan sampah secara efektif dan efisien, dengan melakukan pendekatan berbasis desa atau kecamatan.

Salah satu kecamatan yang mulai terlibat secara aktif dalam upaya penanganan sampah di Kalimantan Timur ialah Kecamatan Samboja di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kecamatan Samboja hingga saat ini masih tergolong ke dalam wilayah yang tidak bersih dan mengalami persoalan serius terkait persampahan. Salah satu di antara sebabnya adalah karena Samboja belum memiliki Tempat Pembuangan Akhir (Humas Kabupaten Kukar, 2019). Sedangkan di saat yang sama potensi sampah di Samboja berkisar 35,7 ton per hari, yang disumbang dari 21 pasar modern dan tradisional, serta beberapa objek wisata di Kecamatan Samboja.

Selain itu, tidak adanya regulasi pada level kecamatan untuk mengatasi populasi sampah yang tidak terkelola menjadi salah satu penyebab utama yang kemudian membuat pengelolaan sampah di Kecamatan Samboja tidak berjalan dengan baik. Berangkat dari dua aspek tersebut, kemudian pemerintah di Kecamatan Samboja membuat Surat Keputusan (SK) Camat yang dilindungi badan hukum resmi, untuk mendirikan badan pengelola sampah yang disebut sebagai Sahabat Sampah. Badan pengelola ini bertugas untuk mengumpulkan sampah yang sebelumnya sudah dikumpulkan pada bank-bank sampah. Hingga saat ini Sahabat Sampah telah melengkapi sarana dan prasarana dengan 1 unit drum truk, 1 unit mobil pick up, 1 unit truck, 2 unit viar, 2 set cangkul, garpu dan skup. Peran Sahabat Sampah dalam penanganan dan pengelolaan sampah di Kecamatan Samboja terlihat sangat signifikan dalam pengurangan populasi sampah illegal dan penanganan yang jelas lebih optimal. Sebelum dibentuk Sahabat Sampah, Kecamatan Samboja tidak memiliki lembaga atau upaya pengelolaan sampah yang tertata dan terorganisir. Terbukti dari volume sampah yang terus bertambah dan terlihat di permukaan jalan-jalan utama. Sehingga kemudian hadirnya Sahabat Sampah sangat berperan penting dalam proses penanganan dan pengelolaan sampah di Kecamatan Samboja menjadi jauh lebih baik.

Penelitian sejenis juga pernah dilakukan sebelumnya, di antaranya oleh Bapping, Paranoan dan Idris pada tahun 2015, dengan tujuan adalah untuk mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan implementasi pengelolaan sampah di Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat. Kemudian Harysa pada tahun 2017, dengan tujuan adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah di Kecamatan Padang Utara Kota Padang, dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat implementasi dari Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah di Kecamatan Padang Kota Padang. Rachmah (2016) melakukan penelitian dengan tujuan untuk menganalisis pelaksanaan peraturan daerah Kota Samarinda No. 02 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah di Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Samarinda dan untuk menjelaskan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi peraturan daerah Kota Samarinda No. 02 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa seluruh penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis implementasi peraturan berbasis daerah atau kabupaten/kota. Berbeda dengan penelitian ini yang memilih untuk menganalisis implementasi peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah ditingkat desa atau kecamatan. Dengan analisis peraturan atau kebijakan pengelolaan sampah setingkat desa atau kecamatan, diharapkan peneliti dapat melakukan eksplorasi dan elaborasi terkait dengan penerapan peraturan tersebut, yang kemudian dapat menjadi inspirasi bagi pemerintah desa/kecamatan lain untuk merancang sebuah kebijakan yang berorientasi pada penanganan permasalahan sampah di wilayah kerja desa/kecamatan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana implementasi pengelolaan sampah melalui “Sahabat Sampah” sebagai inovasi penanganan sampah di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara?”. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara empiris implementasi pengelolaan sampah “Sahabat Sampah” sebagai inovasi penanganan sampah di Kecamatan Samboja.

Kerangka Teori

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi adalah sebuah proses yang melibatkan beberapa unsur penting, di antaranya manusia, dana dan kemampuan organisasional (Widodo, 2010: 41). Proses tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Syahrani (2015: 82) menjelaskan bahwa implementasi merupakan bagian yang sangat penting dalam struktur kebijakan publik. Sebuah kebijakan dapat dikatakan baik apabila dapat diimplementasikan sesuai dengan tujuan kebijakan dibuat dan tidak ada perbedaan antara formulasi kebijakan dengan tujuan yang sudah ditetapkan.

Namun dalam banyak situasi, implementasi diposisikan hanya sebagai pelaksana dari apa yang sudah ditetapkan oleh legislatif dan tidak terlalu memiliki pengaruh dalam kesuksesan sebuah kebijakan (Edwards, 2003: 73). Padahal pada faktanya, proses implementasi menjadi yang sangat substansial karena dapat menjadi penentu sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya atau tidak. Melihat situasi di mana implementasi menjadi salah satu faktor penentu berhasil atau tidaknya sebuah kebijakan, Edwards III (2003: 81) merumuskan beberapa indikator sebagai cara dalam melihat kualitas dan efektivitas dari implementasi sebuah kebijakan.

Di antara indikator tersebut adalah: (1) *Communication*, adalah bagaimana para pelaku kebijakan dalam menyampaikan informasi kepada sasaran kebijakan yang meliputi kejelasan dan konsistensi, (2) *Resources*, adalah berkaitan dengan sumber daya dalam menerapkan kebijakan, yang terdiri dari staff, aparatur, informasi, wewenang dan fasilitas, (3) *Disposition*, adalah bagaimana sikap pelaksana dalam menerapkan kebijakan, yang berkaitan dengan tingkat kepatuhan dan insentif, dan (4) *Bureaucratic Structure*, adalah bagaimana struktur birokrasi yang terdiri dari Standar Operasional Prosedur dan Fagmentasi.

Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah adalah sebuah upaya untuk mengumpulkan, melakukan pengangkutan, mendaur ulang atau membuang dari material sampah (Mundiatun dan Daryanto, 2015: 14). Definisi tersebut mengacu pada material sampah yang dihasilkan oleh manusia dan dilakukan pengelolaan dengan tujuan untuk mengurangi dampak negatifnya bagi kesehatan, lingkungan atau keindahan. Dalam upaya untuk melakukan pengelolaan sampah di sebuah wilayah yang pada umumnya volume sampah terus bertambah, dibutuhkan adanya sistem pengelolaan yang melibatkan lembaga atau instansi yang dilengkapi dengan peraturan, pendanaan, serta sistem pengelolaan yang baik, sehingga bukan hanya mengandalkan kesadaran masyarakat.

Untuk dalam menyelesaikan persoalan sampah dengan membuat sistem pengelolaan yang baik, sebuah wilayah memerlukan peran serta pemerintah. Berkaitan dengan hal tersebut, peran sentral pemerintah di era otonomi adalah bertanggungjawab terhadap pemeliharaan lingkungan dari potensi kerusakan di masa depan, yang dapat mengancam dan membahayakan kehidupan manusia (Marpaung, 2013:3). Lebih jauh lagi, bahwa pemerintah bertanggungjawab penuh atas kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian sudah menjadi bagian dari tanggungjawab pemerintah untuk fokus dalam menyelesaikan persoalan sampah dalam skala apa pun, baik nasional maupun regional. Ndraha (2001: 85) membuat spesifikasi tugas utama pemerintah ke dalam 2 (dua) macam fungsi. Pertama, pemerintah memiliki fungsi primer atau fungsi pelayanan (*services*), sebagai *provider* jasa publik yang baik dan layanan sipil termasuk layanan birokrasi. Kedua, pemerintah memiliki fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan (*empowerment*). Sejauh ini persoalan substansial dalam pengelolaan sampah adalah aspek kelembagaan (Wibowo dan Djajawinata, 2002: 23). Pada umumnya di beberapa wilayah, pengelolaan sampah dilakukan oleh Dinas Kebersihan sebagai fungsi primer dari pemerintah, dan di saat yang sudah melaksanakan fungsi sekunder dengan melibatkan swadaya masyarakat melalui aktifitas atau pun kegiatan pemberdayaan. Masyarakat dan pihak swasta adalah dua aspek yang menjadi faktor penunjang dalam menyelesaikan persoalan sampah di kota-kota besar.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel lain (Sugiyono, 2007: 11).

Descriptive research bertujuan untuk bisa mendeskripsikan atau menjelaskan sebuah situasi atau area populasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat (Danim,

2002: 41). Dapat juga diartikan sebagai penelitian yang bertujuan untuk melihat fenomena individual, situasi tertentu, atau kelompok yang terjadi secara lebih kekinian.

Sumber Data

Sumber data penelitian menjadi salah satu faktor penting di dalam mempertimbangkan dan menentukan metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini terdapat beberapa sumber data, antara lain (Purhantara, 2010: 79) :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau tidak melalui perantara. Data primer dapat berbentuk opini secara individual atau kelompok dari hasil observasi pada benda, kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian. Dalam penelitian ini, sumber data primer di dapat dari hasil observasi lapangan dan wawancara kepada responden yang sudah di tentukan.

b. Data Sekunder

Berupa dokumentasi merupakan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen serta informasi dan arsip-arsip yang dimiliki oleh Sahabat Sampah dan lembaga pengelola sampah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Teknik Pengumpulan Data

Guna mendukung keberhasilan penelitian ini, diperlukan adanya instrumen dan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data dari responden yang telah ditetapkan. Pada penelitian ini instrumen sebagai alat bantu penelitian dengan menggunakan *guide interview*, yaitu sekumpulan pertanyaan yang akan diajukan pada objek penelitian. Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Adalah teknik yang digunakan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan menggunakan sejumlah pertanyaan (*guide interview*) kepada responden. Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk mendapatkan data mengenai implementasi peraturan daerah No. 04 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun pihak yang akan di wawancarai sebagai sumber informasi utama di dalam penelitian ini adalah pihak yang secara langsung terlibat di dalam aktivitas Sahabat Sampah.

b. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan implementasi peraturan daerah No. 04 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Teknis Analisis Data

Analisis data kualitatif dapat dilakukan jika data empiris yang di dapatkan dari proses penelitian berupa kata-kata atau bukan berupa serangkaian angka serta tidak dapat disusun ke dalam kategori atau klasifikasi. Data dapat diperoleh dari berbagai macam cara, di antaranya adalah observasi, wawancara, intisari dokumen hingga rekaman. Sebelum digunakan, data yang sudah diperoleh akan di proses terlebih dahulu menggunakan Teknik pencatatan, pengetikan, penyuntingan hingga alih-tulis. Tetapi dalam proses menganalisis, teknik analisis kualitatif tetap menggunakan kata-

kata dalam sebuah teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu di dalam proses menganalisa.

Proses dalam menganalisis sebuah data kualitatif setidaknya melalui tiga alur penting yang dilakukan secara bersamaan, yaitu mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan/verifikasi. Ketiga alur tersebut terjadi secara bersamaan, yang berarti ketiganya merupakan sebuah siklus yang jalin menjalin dan membangun sebuah interaksi pada saat sebelum, selama dan hingga sesudah pengumpulan data (Silalahi, 2009: 339). Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah mencakup transkrip hasil wawancara, data yang direduksi, proses analisis, interpretasi data dan triangulasi. Dari hasil analisis yang didapatkan kemudian diambil sebuah kesimpulan.

Keabsahan Data

Pada dasarnya proses dalam memeriksa keabsahan data adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari struktur pengetahuan penelitian kualitatif (Moleong, 2007: 320). Keabsahan data dilakukan sebagai upaya untuk membuktikan bahwa penelitian yang digunakan adalah benar penelitian ilmiah, dan di saat yang sama juga digunakan sebagai uji dari data yang diperloleh. Uji keabsahan data di dalam penelitian kualitatif adalah meliputi uji credibility, transferability, dependability dan confirmability (Sugiyono, 2007: 270). Uji keabsahan dilakukan agar penelitian dapat dipertanggungjawabkan sebagai sebuah penelitian yang ilmiah.

Hasil dan Pembahasan

Hasil dan pembahasan mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui Sahabat Sampah di Kecamatan Samboja dapat ditinjau dari beberapa indikator yang dikembangkan oleh Edward III (1980), di antaranya mengenai aspek, *Communication, Resources, Disposition, Bureaucratic Structure*.

Pertama, komunikasi menjadi faktor yang sangat penting dalam proses implementasi sebuah kebijakan. Peran komunikasi akan menentukan seberapa jauh pemahaman *stake holder* atau pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan, yang kemudian mempengaruhi bagaimana cara mereka melaksanakan kebijakan. Menurut Edwards III (2003, 97), bahwa informasi terkait dengan kebijakan publik penting untuk disampaikan kepada pelaku kebijakan, agar mereka mengetahui terkait apa yang harus disiapkan dan dilakukan untuk menjalankan kebijakan yang dimaksud, sehingga tujuan dan sarana dari kebijakan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan Peraturan Daerah No 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Kutai Kartanegara, pada BAB IV bagian kesatu tentang kelembagaan poin (2), dijelaskan bahwa untuk menyelenggarakan pelayanan pengelolaan sampah, maka Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah ditingkat kecamatan, kelurahan/desa, dan kawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada poin (3) lebih jauh dijelaskan bahwa lembaga pengelola sampah kelurahan/desa meliputi lembaga pengelolaan sampah tingkat Rukun Tetangga, Rukun Warga dan kelurahan. Berdasarkan penjelasan pada butir Perda No 14 Tahun 2014 di atas, maka dapat dilihat bahwa berkaitan dengan implementasi Surat Keputusan Camat Samboja tentang pembentukan Sahabat Sampah, komunikasi yang harus dilakukan adalah hingga pada tingkat rukun tetangga. Tujuannya agar seluruh aspek hingga tingkat paling bawah memahami peraturan dan dapat terlibat secara langsung dalam proses implementasi.

Berdasarkan hasil analisis terhadap data penelitian, pemerintah kecamatan Samboja telah melakukan komunikasi secara aktif kepada pihak-pihak terlibat (aparatur desa) untuk kemudian bersama-sama bergerak mengupayakan pengelolaan sampah di Kecamatan Samboja. Pihak kecamatan beserta dengan tim pelaksana Sahabat Sampah telah mengundang beberapa lapisan masyarakat, di antaranya lurah dan rukun tetangga, yang kemudian memberikan sosialisasi terhadap kebijakan pengelolaan sampah yang akan dilakukan oleh Sahabat Sampah dan beberapa program kerjanya.

Berdasarkan Perda No 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Kutai Kartanegara, pada BAB IV bagian kesatu tentang kelembagaan poin (5) butir (b) dijelaskan bahwa di antara tugas lembaga pengelola sampah ditingkat rukun tetangga dan rukun warga memiliki tugas membina masyarakat untuk terlibat langsung dalam pengelolaan sampah dengan prinsip 3R. Edwards III (2003: 104) juga menjelaskan bahwa dalam melakukan komunikasi terhadap sebuah kebijakan pada dasarnya mengandung beberapa dimensi, di antaranya adalah dimensi transmisi (*transmission*). Dimensi ini mengarahkan agar kebijakan publik disampaikan secara menyeluruh, bukan hanya kepada pelaksana (*implementator*) kebijakan, tetapi juga kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan secara langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, bahwa Sahabat Sampah telah melakukan komunikasi berupa sosialisasi kepada masyarakat mengenai berbagai agenda serta program yang akan dijalankan. Masyarakat menerima dengan sangat baik kebijakan pengelolaan sampah yang diinisiasi oleh pemerintah kecamatan. Proses komunikasi juga berjalan dengan baik, hampir tidak ada hambatan yang berarti. Salah satu indikator suksesnya komunikasi adalah bagaimana respon masyarakat setelah dilakukan komunikasi dan sosialisasi terkait dengan kebijakan pengelolaan sampah. Faktanya di Kecamatan Samboja hari ini, keterlibatan masyarakat dalam berbagai program Sahabat Sampah sangat baik, aktif dan semakin hari menunjukkan pertumbuhan yang meningkat. Terlepas dari beberapa kondisi yang memang belum maksimal, seperti masih ada sebagian masyarakat yang membuang sampah di tempat-tempat ilegal. Upaya terus dilakukan oleh Sahabat Sampah untuk mencapai tingkat keberhasilan yang optimal dengan penambahan sumber daya, bekerjasama dengan lembaga swadaya, melengkapi sarana dan prasarana, dan sebagainya. Kedua, sumber daya menjadi salah satu kunci dalam pelaksanaan sebuah kebijakan. Tanpa sumber daya baik secara kuantitas maupun kualitas, maka akan sangat berpengaruh terhadap proses implementasi hingga mencapai tingkat keberhasilan yang optimal. Edward III dalam Widodo (2010:98) menjelaskan bahwa sumberdaya memiliki peran sangat penting dalam implementasi sebuah kebijakan. Dalam teorinya, Edward III mengklasifikasikan sumberdaya menjadi: sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan.

Berdasarkan Peraturan Daerah No 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Kutai Kartanegara pasal 25 poin (4) dijelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggungjawab untuk menyediakan fasilitas pengolahan sampah pada wilayah pemukiman berupa TPS 3R, stasiun pealihan sementara, TPST dan TPA. Lebih lanjut dijelaskan pada Bagian Keempat (Sarana dan Prasarana) pasal 28 bahwa sarana dan prasarana pengolahan sampah antara lain terdiri atas: tempat sampah/wadah sampah, TPS/TPST, TPS 3R, TPA, Gerobak Sampah dan kendaraan pengangkut sampah.

Peran sumber daya peralatan juga ditegaskan oleh Edwards III dalam Widodo (2010:102), bahwa fasilitas fisik menjadi sumber daya penting dalam proses implementasi.

Bagaimana pun pelaksana memiliki sumber daya manusia yang baik, tanpa di dukung oleh peralatan yang baik, sarana dan prasarana yang memadai, maka proses implementasi tidak akan berhasil. Pada kasus implemenasi kebijakan pengelolaan sampah melalui Sahabat Sampah di Kecamatan Samboja, berdasarkan hasil analisis di atas maka dapat dilihat bahwa pemerintah kecamatan sudah menyediakan berbagai sumber daya untuk mendukung proses pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah. Di antara sumber daya yang telah disiapkan adalah berbagai peralatan, mobil operasional, hingga sumber daya manusia atau operator.

Kesiapan dalam menjalankan kebijakan sesungguhnya sudah dilakukan oleh pemerintah kecamatan, mengingat sumber daya sangat menentukan jalannya kebijakan. Selama ini, sejak Sahabat Sampah mulai menjalankan aktivitasnya, area pengelolaan masih terpusat pada titik-titik darurat sampah di Kecamatan Samboja, seperti area pembungan illegal, tepi pantai, sungai-sungai yang mengalami pendangkalan karena tumpukan sampah. Di sisi lain Sahabat Sampah juga memiliki berbagai program pendukung, di antaranya bank sampah, lomba kebersihan antar desa, pengambilan sampah ke rumah-rumah, dan sebagainya. Meskipun sudah disiapkan berbagai sumber daya dalam pengelolaan kebijakan, tentu masih ada beberapa kekurangan yang membuat implementasi kebijakan belum berjalan secara optimal. Di antara persoalannya adalah jumlah sumber daya yang tidak berbanding lurus dengan luas area di Kecamatan Samboja, juga tidak sebanding dengan kompleksitas persoalan yang harus diselesaikan.

Berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia, Edwards III dalam Widodo (2010:98) menjelaskan bahwa sumber daya yang paling penting dalam proses implementasi adalah staff (manusia). Lebih jauh Edwards III menegaskan bahwa sumber daya manusia yang terbatas akan memiliki dampak buruk bagi efektifitas pelaksanaan kebijakan. Sejauh ini, Sahabat Sampah memiliki 5 sumber daya manusia yang terdiri dari: (1) 1 orang petugas penarik iuran, (2) 3 orang petugas pengangkutan sampah dan (3) 1 orang supir. Jumlah sumber daya ini jika dibandingkan dengan total wilayah dan beban pekerjaan tentu belum maksimal. Tetapi kemudian ada skala prioritas yang dilakukan oleh Sahabat Sampah dalam upaya penanganan sampah di Kecamatan Samboja. Di antaranya adalah strategi pengelolaan sampah rumah tangga, yang ditunjang juga dengan penanganan sampah liar bersama aktivis sosial atau swadaya masyarakat.

Berdasarkan Perda No 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Kutai Kartanegara, Bagian Kelima (Pembiayaan) pasal 34 pada poin (a) dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah sesuai kebutuhan pelayanan dan kemampuan keuangan daerah. Pada poin (b) lebih jauh dijelaskan bahwa kebutuhan pelayanan yang dimaksud adalah penyediaan sarana dan prasarana, operasional dan pemeliharaan, pengendalian dampak lingkungan dan pengembangan pelayanan, meliputi penyapuan, pengumpulan dan pemindahan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.

Pemerintah Kecamatan Samboja mengakui jika sejauh ini kendala penambahan sumber daya memang terjadi. Hal tersebut disebabkan oleh struktur pendanaan yang masih belum maksimal untuk membiayai operasional Sahabat Sampah. Sehingga berpengaruh terhadap upaya penambahan dan pengadaan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pengelolaan sampah di Kecamatan Samboja. Dalam soal pendanaan dan anggaran, Edwards III dalam Widodo (2010: 101) menjelaskan bahwa keterbatasan sumber daya anggaran akan berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan sebuah kebijakan. Selain akan berdampak pada tidak optimalnya pelaksanaan program, keterbatasan anggaran juga menyebabkan rendahnya disposisi para pelaku kebijakan. Saat ini, Sahabat Sampah memiliki sumber dana

yang berasal dari APBD sebagai THL/Honorarium Kecamatan dan juga hasil dari penarikan iuran setiap rumah dari para warga yang mendaftar sebagai peserta pengelolaan sampah sebesar 30.000/bulan. Sejauh ini sudah ada sekitar 423 rumah yang terdaftar sebagai peserta dan menjadi sumber dana rutin bulanan Sahabat Sampah yang jika di total adalah sebesar 12.690.000/bulan.

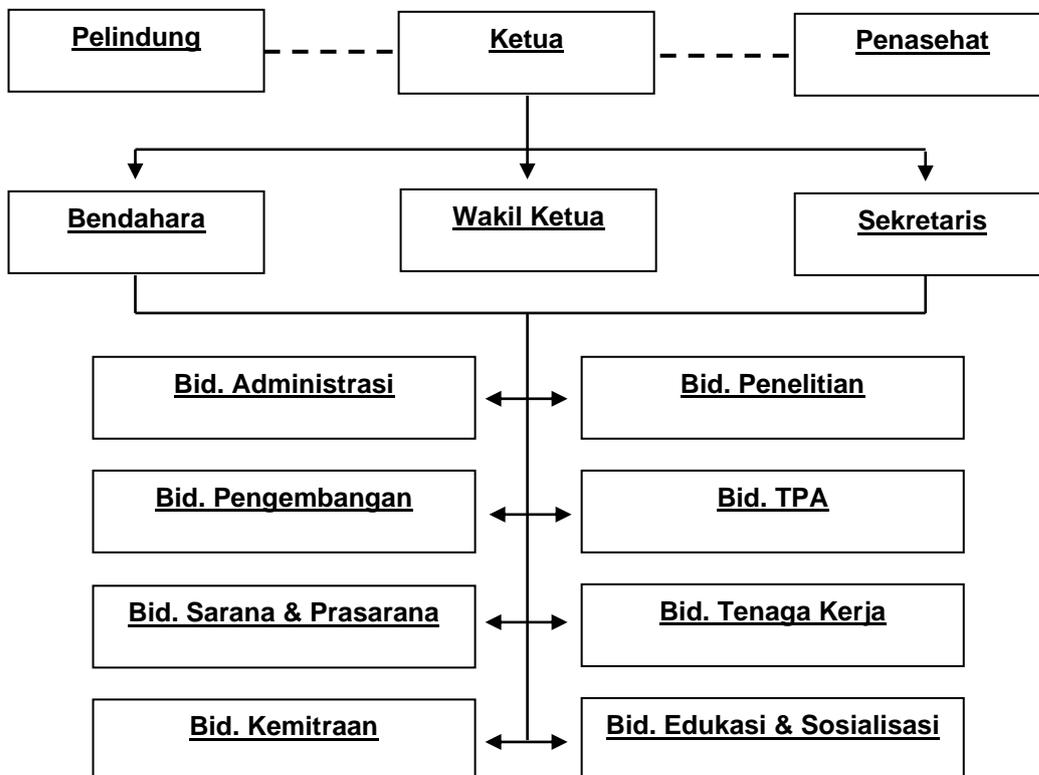
Sedangkan sarana dan prasarana yang dimiliki Sahabat Sampah untuk kebutuhan operasional pengelolaan sampah, terdapat 3 truk pengangkut dan 2 motor sampah. jika dibandingkan dengan total kebutuhan pengelolaan sampah tentu masih jauh dari cukup. Tetapi kemudian dengan sarana yang ada, Sahabat Sampah sudah melakukan upaya optimal untuk melakukan pengelolaan sampah, setidaknya dari masyarakat yang mendaftarkan diri sebagai mitra pengelolaan sampah. Terlepas dari masih ada kekurangan terkait jumlah sumber daya, pemerintah kecamatan melalui tim pelaksana Sahabat Sampah dapat memastikan jika sumber daya yang ada telah bekerja dengan sangat maksimal dalam mengelola sampah dan menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang terpadu. Karena itu meskipun secara kuantitas masih sangat kurang, tetapi secara kualitas kinerja sudah dapat dikatakan sangat baik. Ketiga, disposisi adalah peralihan kewenangan yang terjadi dari pembuat kebijakan dan pelaku atau pelaksana kebijakan. Edward III dalam Widodo (2010: 104-105) menjelaskan agar pelaksanaan sebuah kebijakan dapat berjalan secara efektif dan juga efisien, para pelaku kebijakan tidak hanya cukup dengan mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kemampuan untuk melakukan, tetapi juga harus memiliki kemauan untuk melaksanakan kebijakan. Setidaknya ada 2 faktor yang menjadi fokus Edwards III dalam implementasi kebijakan, yaitu pengangkatan birokrasi dan insentif.

Peralihan yang tidak baik akan membuat pelaksana menjadi seperti tidak memiliki wewenang penuh dalam menjalankan tugas. Dalam banyak kasus, disposisi yang dimaksud oleh pembuat kebijakan erat dihubungkan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), yaitu pedoman dalam menjalankan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui Sahabat Sampah, disposisi kewenangan jelas tertuang dalam Surat Keputusan Camat No. 062/009/KEC-SJA/2017 tentang Penetapan Struktur Pengelola Sampah “Samboja Harus Bersih dan Sehat “ (Sahabat Sampah). Dalam SK Camat tersebut diputuskan terbentuknya sebuah lembaga yang kemudian disebut Sahabat Sampah sebagai badan yang secara resmi ditunjuk oleh pemerintah kecamatan sebagai implementator pengelolaan sampah di Kecamatan Samboja. Dimuat di dalam surat keputusan struktur pengurus dan beberapa instrument implementasi lain seperti agenda dan program kerja.

Dalam konteks pengelolaan sampah di Kecamatan Samboja melalui Sahabat Sampah, pemerintah kecamatan telah memberikan panduan kerja atau SOP yang berisi tentang bagaimana cara Sahabat Sampah dalam melakukan pengelolaan terhadap masalah sampah di wilayah Kecamatan Samboja. Dari panduan kerja tersebut juga terdapat program-program atau aktivitas yang dapat dilakukan sebagai upaya untuk melakukan pengelolaan sampah. Dari panduan kerja yang merupakan bagian dari peran disposisi, Sahabat Sampah bersama dengan pemerintah kecamatan telah melakukan sosialisasi atau disposisi kewenangan kepada pemerintah di tingkat RT/RW untuk ikut terlibat dalam melakukan implementasi program dari Sahabat Sampah, seperti Bank Sampah yang terpusat di masing-masing desa, atau lomba kebersihan tingkat desa, dan sebagainya. Kewenangan yang di disposisi dengan baik di tingkat lebih rendah seperti RT/RW akan semakin mempermudah implementasi karena keterlibatan yang semakin menyeluruh dari struktur dan perangkat pemerintah.

Keempat, struktur birokrasi diperlukan sebagai alur dalam proses implementasi, wewenang dan peralihan informasi. Edward III menegaskan dalam Widodo (2010: 106), bahwa di antara faktor yang menjadi penyebab tidak efektifnya implementasi sebuah kebijakan adalah ketidakefisienan struktur birokrasi. Menurut Edwards III, struktur birokrasi mencakup berbagai aspek, di antaranya struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antar unit dan sebagainya. Dalam konteks Sahabat Sampah, struktur birokrasi sudah jelas tertera pada Surat Keputusan Camat (SK Camat Samboja) No 062/009/KEC-SJA/2017 2. Di dalamnya tertera struktur perangkat pelaksana Sahabat Sampah yang kemudian akan mendapat wewenang penuh dalam menjalankan program dan aktivitas penanganan sampah di Kecamatan Samboja. Struktur Sahabat Sampah hanya terdapat di level kecamatan, dan pada level desa disebut sebagai koordinator penanganan sampah yang terbentuk seiring dengan berbagai program yang dilakukan oleh Sahabat Sampah.

Dengan struktur seperti pada Gambar 1, Sahabat Sampah dapat dengan mudah melakukan koordinasi terpusat di tingkat desa berkaitan dengan berbagai hal, seperti program, kegiatan, aktivitas dan lainnya. Hingga saat ini, struktur yang terbentuk dinilai efektif dalam mempermudah implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Samboja. Dengan keterlibatan secara aktif dari perangkat masing-masing desa, juga menjadi penentu seberapa jauh keterlibatan lapisan masyarakat dalam mendukung pengelolaan sampah terpadu yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Struktur birokrasi yang sederhana juga mempermudah Sahabat Sampah dalam melakukan koordinasi, menjalankan berbagai program dan fokus pada penyelesaian masalah di lapangan. Pada dasarnya yang dibutuhkan Sahabat Sampah adalah personil kerja di lapangan, dan jumlah personil itu yang sebaiknya menjadi fokus perhatian, bukan jumlah struktur birokrasi di level organisasi.



Gambar 1. Struktur Birokrasi Sahabat Sampah

Urgentitas ini menjadi penting untuk diperhatikan, dengan minimnya dana yang masih menjadi permasalahan utama, pemerintah Kecamatan Samboja harus

teliti dalam menimbang skala prioritas. Sahabat Sampah masih membutuhkan banyak personil atau operator di lapangan, sehingga dana yang ada sebaiknya fokus pada penambahan sumber daya atau operator dan bukan penggemukan struktur organisasi. Kebijakan yang dilakukan selama ini sudah benar, melihat struktur birokrasi Sahabat Sampah yang tidak banyak dan lebih mengandalkan sinergi atau swadaya dari masyarakat. Dengan sinergisitas yang baik, pengelolaan sampah di Kecamatan Samboja dapat berjalan dengan lebih optimal daripada hanya bertumpu pada struktur perangkat Sahabat Sampah yang tentu tidak dapat berjalan sendiri tanpa keterlibatan secara aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Dalam penanganan sampah perlu keterlibatan menyeluruh dan bukan hanya bertumpu pada apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Karena itu keberhasilan sahabat sampah hingga saat ini adalah karena selain melakukan penanganan sampah, mereka juga mengupayakan tumbuhnya kesadaran dari masyarakat untuk bersama-sama melakukan upaya pengelolaan sampah yang benar dan terpadu.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan

Implementasi Surat Keputusan Camat Samboja No. 062 / 009 / KEC-SJA / 2017 Tentang Penetapan Struktur Kepengurusan Pengelola Sampah “Samboja Harus Bersih dan Sehat” (Sahabat Sampah) sudah berjalan dengan baik. Meskipun pada beberapa aspek masih ada yang harus ditinjau kembali untuk dilakukan evaluasi dan diperbaiki. Di antaranya adalah pada aspek sumber daya yang terbatas baik dari pekerja maupun pendanaan. Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan Surat Keputusan Camat Samboja No. 062 / 009 / KEC-SJA / 2017 Tentang Penetapan Struktur Kepengurusan Pengelola Sampah “Samboja Harus Bersih dan Sehat” (Sahabat Sampah) adalah peran aktif masyarakat yang ikut terlibat dalam berbagai kegiatan dan agenda yang dijalankan oleh Sahabat Sampah.

Rekomendasi

Saran untuk Sahabat Sampah agar lebih maksimal dalam melakukan edukasi kepada masyarakat secara luas dan menyeluruh, sehingga peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat akan sangat mendukung berhasilnya pengelolaan sampah di wilayah Kecamatan Samboja. Selain itu pemerintah kecamatan melalui Sahabat Sampah juga diharapkan dapat melakukan disposisi atau melibatkan seluruh perangkat desa dalam proses implementasi pengelolaan sampah, sehingga sosialisasi dan keterlibatan masyarakat dapat terus berkembang hingga ke setiap desa di Kecamatan Samboja. Kemudian bagi pemerintah daerah Kutai Karnategara, diharapkan dapat memberikan tambahan pendanaan sehingga Sahabat Sampah dapat menambah sumber daya, baik sarana prasarana maupun perangkat personil lapangan agar dapat melakukan pengelolaan secara lebih optimal.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. 2016. Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2016
- _____. 2015. “Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2015
- Bapping, Dominikus, DB. Paranoan, Adam Idris. 2015. Implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, Jurnal Administrasi Reform, Universitas Mulawarman Samarinda
- Bupati Kutai Kartangerara. 2014. Peraturan Daerah No 04 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

- Damanhuri, Enri dan Padi, Tri. 2010. Pengelolaan Sampah. Diktat Kuliah. Bandung: Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB
- Danim, Sudarwan. 2002. Menjadi Peneliti Kualitatif, CV. Pustaka Setia, Bandung
- Edwards III, George C. 2003. *Implementing Public Policy*, Jakarta
- Elamin, Muhammad Zamzami, Kartika Nuril Ilmi, *et al.* 2018. Analisis Pengelolaan Sampah Pada Masyarakat Desa Disanah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang. *Jurnal Kesehatan Lingkunga*, Vol. 10 No. 04
- Harsya, Irfan. 2017. Implementasi Peraturan Daerah No 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Padang Utara Kota Padang, *JOM FISIP* Vol 4 No. 1, Universitas Riau
- Jembeck, Jenna., Roland Geyer, Chris Wilcox, Theodore R, Miriam Perryman. 2015. *Plastic Waste Inputs From Land Into The Ocean*. AAAS: Vol: 347
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2020. Indonesia Memasuki Era Baru Pengelolaan Sampah. Di akses pada 29 Januari 2021. http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/2329
- Marpaung, Anggi Azmita Fiqriyah. 2013. Keanekaragaman Makrozoobenthos di Ekosistem Mangrove Silvofishery dan Mangrove Alami Kawasan Ekowisata Pantai Boe Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar. Skripsi pada Prodi Ilmu Kelautan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanudin Makassar
- Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung
- Mundiatur dan Daryanto. 2015. Pengelolaan Kesehatan Lingkungan. Gava Media, Yogyakarta
- Ndraha Taliziduh. 2001. Teori Budaya Organisasi. Cetakan Pertama. PT. Rineka Cipta, Jakarta
- _____. 2003. Budaya Organisasi. Rineka Cipta, Jakarta
- Purhantara, Wahyu. 2010. Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis. Edisi pertama. Yogyakarta. Graha ilmu
- Purnaweni, Hartuti. 2017. Bom Waktu Sampah, Wacana, Suara Merdeka Jawa Tengah
- Quina, Marghareta, Fajri Fadhillah, Angela Vania. 2019. Kewenangan Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah. ICEL: Seri Pengelolaan Sampah 2
- Rachmah, Siti. 2016. Implementasi Peraturan Daerah No 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Samarinda, *Jurnal Paradigma*, Universitas Mulawarman, Vol 5 No 1
- Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional. 2018. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Diakses 12 Desember 2020. <http://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>
- SK CAMAT SAMBOJA 062/009/KEC-SJA/2017 2
- Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung
- _____. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung
- Syahrani. 2015. Analisis Kebijakan Publik, Makindo Grafika, Yogyakarta
- Tangkilisan, Hessel Nogi. 2003. Kebijakan Publik yang Membumi, Konsep, Strategi dan Kasus. Lukman Offset dan YPAPI, Yogyakarta
- Ulber, Silalahi. 2009. Metode Penelitian Sosial. PT. Refika Aditama, Bandung
- Vinod Thomas dkk, 2001. *The Quality Of Growth: Kualitas Peertumbuhan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Wibowo, A. dan Djajawinata D.T. 2002. Penanganan Sampah Perkotaan Terpadu. Diakses tanggal 4 Desember 2019 pada halaman www.kkpi.go.id.
- Widodo, Joko. 2010. Analisis Kebijakan Publik. Bayumedia Publishing, Malang